

Polarisasi Masyarakat Dukuh Sukun Dalam Proses Transformasi Wisata Pesisir Pantai Pasca Abrasi

Polarization Of The Dukuh Sukun Community In The Process Of Post-Abrasion Coastal Tourism Transformation

Agus Yuliono^{1*}

¹ Prodi Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Tanjungpura
Surel: agus.yuliono@fisip.untan.ac.id

Abstract

This research examines the process of transformation that occurs in coastal communities in the Sukun hamlet, Yogyakarta. The Dukuh Sukun community is known as a coastal community that depends a lot on beach tourism for its business. The development of tourism and relations between people and nature do not always run in harmony. Including the people of Duku Sukun who are dealing with social and natural conflicts. The purpose of this research is to explore the period of development of the coastal community in the Sukun hamlet in response to nature-tourism-beach abrasion-and social conflict in coastal spatial planning. The research method used is qualitative. The study of social transformation and conflict is used to dissect the problems in this study. The results of the study show that the transformation process of the Sukun hamlet community from different periods will be seen how initially there was awareness to respond to nature, namely greening beaches and increasing agriculture. Then in the next period there is awareness to respond to beach tourism in which there is a monetization process and the emergence of local power actors. The dynamics in the process of social transformation in the Sukun hamlet can be seen from the awareness of the position and social status of leaders or local power who play their role in creating role plays or rules of the game in the management of Sukun beach. The space that used to be a shared space has now been partitioned off, separating one from the other and busy with their own interests. When there is no shared dialogue space, what happens is conflict based on monetization and transactional space (maximizing profits in the struggle for space).

Keywords: *polarization, social transformation, coastal communities*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang proses transformasi yang terjadi pada masyarakat pesisir pantai di dukuh Sukun, Yogyakarta. Masyarakat dukuh Sukun dikenal sebagai masyarakat pesisir yang banyak menggantungkan usaha dari wisata pantai. Perkembangan pariwisata dan relasi antar masyarakat dengan alam tidak selalu berjalan harmonis. Termasuk masyarakat dukuh Sukun yang berhadapan dengan konflik sosial dan alam. Tujuan penelitian ini untuk mendalami periode perkembangan masyarakat pesisir dukuh Sukun dalam merespon alam-wisata-abrasi pantai-dan konflik sosial dalam tata ruang pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kajian transformasi dan konflik sosial digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi masyarakat dukuh Sukun dari periode yang berbeda akan terlihat bagaimana yang awalnya ada kesadaran untuk merespon alam yaitu penghijauan pantai dan peningkatan pertanian. Lalu periode berikutnya ada kesadaran untuk merespon wisata pantai yang didalamnya ada proses monetisasi dan munculnya aktor-aktor kekuasaan lokal. Dinamika dalam proses transformasi sosial di dukuh Sukun terlihat adanya kesadaran posisi dan status sosial para pemimpin atau local power yang memainkan peranannya untuk menciptakan role play atau aturan main dalam pengelolaan pantai Sukun. Ruang yang dulunya menjadi ruang bersama kemudian tersekat-sekat memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri. Ketika tidak ada ruang dialog bersama maka yang terjadi adalah konflik yang didasarkan pada monetisasi dan transaksional ruang (maksimalisasi keuntungan dalam perebutan ruang).

Kata Kunci: polarisasi, transformasi social, masyarakat pesisir

Pendahuluan

Kajian tentang proses transformasi sosial menjadi semakin penting seiring dengan adanya perubahan yang terjadi begitu pesat dalam segala bidang. Selama ini ada kekeliruan sudut pandang ketika terjadi perubahan maka masyarakat hanya pasif menerima, padahal masyarakat memiliki kemampuan sosial untuk merespon, aktif dan reaktif. Point penting kajian transformasi adalah melihat bagaimana perubahan terjadi dari internal masyarakat sendiri dalam menanggapi dinamika sosial budaya yang terjadi. Akses terhadap pengelolaan sumber daya juga menjadi penentu dalam proses transformasi. Dinamika kelas di dalam transformasi bisa terlihat dari proses internal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan munculnya tarikan berbagai kepentingan yang berbeda yang dalam kurun waktu tertentu bisa bersama tetapi juga bisa bertentangan dalam kondisi dan waktu yang berbeda. Masyarakat dukuh Sukun dilihat dari wilayahnya adalah masyarakat yang berbasis pertanian dan kelautan (sebagai nelayan). Seperti pemandangan suasana desa ketika berkunjung, saya melihat para warga Sukun yang juga sebagai pedagang di pantai Sukun terlihat banyak senyum, ramah, tenang, damai, tenteram bahkan terlihat santai. Namun, terlihat kontras ketika saya mencoba untuk berbincang lama dengan beberapa pedagang mengenai perkembangan pedagang di pantai Sukun dan pandangan mereka tentang abrasi yang melanda. Sambil menikmati keindahan pantai dan enakannya santapan ikan yang dijual pedagang Sukun, mereka bercerita mengenai kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha mereka akibat faktor alam yaitu abrasi yang terus terjadi dan faktor sosial yaitu tarikan berbagai kepentingan dalam kuasa ruang.

Selama ini kajian tentang transformasi sosial dilihat dengan cara pandang dari luar yaitu bagaimana masyarakat berubah karena faktor eksternal atau di luar dari kehendak masyarakat tersebut. Banyak ilmuwan sosial budaya yang mengkritisi mengenai transformasi sosial, yang dalam perjalanannya banyak dimasukkan dalam salah kaprahnya menjadi bahasa “pembangunan”. Bahasa pembangunan mengarah pada mod ernisasi yang sekedar melihat bagaimana memperbaiki standar hidup dan bisa dikaji untuk memahami bagaimana hegemoni itu berlangsung (Fakih, 1996). Modernisasi hanya menekankan pada pertumbuhan dan pendapatan dibandingkan melihat proses dinamika transformasi masyarakat secara endogen. Soedjito (1993: 55) dalam tulisannya dalam konteks jaman saat itu yaitu orde baru mengarahkan transformasi sosial menuju masyarakat industri dengan melakukan perubahan sosial dan kebudayaan. Kritik tajam mengenai transformasi sosial yang selama ini lebih populer dengan bahasa pembangunan dituliskan Mansour Fakih (1996:138) bahwa ada bias saintifik dan teknokratis bahwa dalam pembangunan ternyata selama ini masih didominasi oleh epistemologi empirisme dan positivisme sehingga tidak menganggap berartinya kearifan pengetahuan lokal dan tradisi masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sebagai “obyek” proyek yang dikuantifikasi sebagai angka-angka dan diminta “ikut serta” dalam pengertian mendukung program yang direncanakan dan dirancang oleh pihak di luar masyarakat seperti pemerintah, LSM atau peneliti. Pemberdayaan dengan tambahan embel-embel “partisipasi” hanya sekedar dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi masyarakat daripada menciptakan ruang masyarakat secara internal untuk melakukan transformasi.

Transformasi sosial selama ini (pasca orde baru) juga dimaknai sekedar pemberdayaan di dua hal yaitu ekonomi dan ipteks. Dalam beberapa tulisan bahwa aspek kultural dianggap sebagai penghambat bahkan perlu mendapatkan solusi pemecahannya. Oleh karena seiring adanya perubahan material harus disertai perubahan kultural. Perlu penyadaran masyarakat

untuk merubah mindset maupun kultural mereka sehingga bisa mengimbangi perubahan infrastruktur fisik dan menuju ke modernisasi. (Kartodirdjo. 1990). Aspek sosial budaya terlalu sering diabaikan dalam proses di dalamnya dan masyarakat seringkali hanya dijadikan sasaran atau obyek yang pasif sehingga membutuhkan bantuan maupun arahan dari pihak di luar masyarakat. Sudut pandang ini sendiri menafikkan bahwa masyarakat juga punya nilai sosial budaya dan pengetahuan untuk merespon secara aktif terhadap perubahan yang terjadi (Hoed, 2001:11). Dalam refleksi mengenai transformasi sosial maka gagasan-gagasan teoritis dalam ilmu sosial budaya akhirnya perlu dipertanyakan kembali, apakah sudah mencerminkan apa yang dipahami oleh kelompok sosial atau masyarakat yang dijadikan sasaran tentang dirinya, lingkungan sosialnya, atau lingkungan biofisiknya?. Berdasarkan keraguan itulah maka penelitian tentang pikiran, pandangan, dan perasaan warga masyarakat terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat sangat penting untuk dikembangkan (Hoed, 2001).

Pembicaraan tentang transformasi sosial budaya membicarakan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial dan budaya (Kayam, 1993:178). Perhatian terpenting dalam kajian transformasi sosial adalah bagaimana proses perubahan dari dalam masyarakat itu terjadi yang melibatkan aktor-aktor yang berbeda yang mengakibatkan perubahan isi (nilai) dan bentuk (aktivitas dan material). Proses internal masyarakat menjadi titik fokus dalam tulisan ini. Respon masyarakat dalam transformasi sosial akan terlihat berbeda-beda. Perubahan bisa terjadi tidak sejalan antara isi dan bentuk maupun antara nilai primer dan sekunder. Problematik yang terjadi dalam proses transformasi sosial dijelaskan oleh Alvian (1986:43), adanya pertentangan antara nilai primer (ide/norma) dengan nilai sekunder instrumental (perilaku/kerja). Bahkan perubahan nilai-nilai instrumental seringkali melupakan nilai-nilai dasar. Seperti juga yang dirisaukan oleh Soedjito (1986), bahwa kita sering tidak menyadari bahwa berbagai tradisi telah mekin menghilang dan kita larut dalam tradisi baru dan menjauhkan dari basis kehidupan mereka sendiri. Seringkali arah transformasi untuk perubahan memasukkan nilai-nilai dan material yang baru tanpa memperhatikan tradisi yang ada. Akibatnya tradisi menjadi terkubur dan masyarakat sulit menerimanya (Hoed. 2001: 28)

Gejala modernisasi telah mengarahkan masyarakat dalam perubahan ke dalam tatanan baru yang seringkali menimbulkan masalah yaitu kesenjangan antara bentuk dan isi atau nilai-nilai sosial masih dipegang teguh tetapi strukturnya berubah menjadi modern yang tidak bisa menampung nilai-nilai sosial sebagai wadahnya. Kuatnya pimpinan dalam setiap kelompok menjadi penentu dalam kuasa dan pengaturan akses sumber daya di dalamnya melalui saluran-saluran tradisional. Tulisan ini melihat bagaimana proses transformasi yang terjadi pada masyarakat dukuh Sukun, Bantul, Yogyakarta dari perkembangannya berdasarkan periode waktu, sisi praktis yaitu bagaimana proses respon masyarakat dan secara analitis yaitu bagaimana peningkatan kompleksitas sosial yang terjadi di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 di Dusun Sukun yang berada di pesisir selatan Yogyakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Dukuh Sukun, dalam pengelompokan secara lebih spesifik terdiri dari Kepala Dukuh, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pedagang, pemilik usaha, perangkat desa, kelompok nelayan dan masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif etnografi. Menurut Suryana (2007) pada penelitian kualitatif, langkah-langkah atau tahapan penelitian

terbagi kedalam tiga bagian, yakni tahap persiapan/pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Kualitatif digunakan untuk mendekati dan memahami, menggali serta mengungkapkan permasalahan tertentu dari responden penelitiannya (metode penelitian kualitatif). Kelebihan lainnya yang membuat penulis memilih metode kualitatif dalam penelitian karena kualitatif bersifat lebih mendetail dan mendalam dalam mengkaji permasalahan (Tobing et al., n.d.).

Dalam teknik pengumpulan datan menggunakan tiga metode yaitu, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses keabsahan data supaya sesuai dengan data dilapangan peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan dan teknik triangulasi. Kemudian dari teknik analisis data peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu, tahapan reduksi data, tahapan penyajian data, dan tahapan verifikasi data.

Hasil dan Diskusi

Akhir tahun 2019, abrasi di pantai selatan Yogyakarta semakin membesar bahkan pasir dan tanah daratan banyak yang tergerus. Termasuk pepohonan dan bangunan di pinggir pantai. Pantai Sukun juga menjadi korban keganasan abrasi. Masih terlihat keramaian para pengunjung yang sedang menikmati pantai dengan segala keindahan laut dan keteduhan pepohonan di pinggir pantai. Berjalan menyusuri pantai Sukun terlihat banyak warung makan, kolam renang anak-anak, toilet dan juga termasuk para pedagang yang menggelar jualannya dengan meja dan kursi seadanya maupun ada yang jualan dengan lesehan memakai tikar. Sepanjang pinggiran pantai banyak berjejer bangunan permanen yang digunakan sebagai warung bahkan beberapa terlihat ada banyak tali jemuran yang berarti digunakan sekaligus tempat tinggal. Beberapa pedagang ada juga yang berjualan hasil pertanian seperti bawang, ketela, maupun pisang yang dijual dengan duduk di pinggir pantai. Usaha parkir kendaraan para pengunjung juga ada banyak, ada di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Beberapa tertata rapi tetapi ketika semakin ramai pengunjung, motor dan mobil terlihat tidak beraturan parkir di bawah pohon sehingga menyulitkan pengunjung lain untuk menuju pantai.

Teduhnya pepohonan dan bisa makan di atas pasir yang jaraknya dekat dengan laut, menurut hasil wawancara kepada beberapa pengunjung menjadi alasan daya tarik ke pantai Sukun. Keberadaan rumah makan, warung dan toilet terlihat berpencair dan beberapa ada yang berdekatan bahkan banyak yang berdekatan antara rumah makan, warung kecil dan toilet karena satu kapling itu dimiliki satu keluarga. Begitu juga kapling milik warga lainnya banyak yang dibangun rumah makan dan toilet sekaligus. Sebagian masyarakat Sukun dalam wawancara menyadari memang di pantai Sukun tidak ada perencanaan maupun penataan. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara berikut:

“Orang Sukun itu sulit untuk diatur. Berbeda dengan pantai yang lain, kebanyakan wisata pantai itu didahului dengan penataan tempat dan orang-orang di dalamnya oleh pemerintah. Setelah itu pengunjung baru berdatangan. Kalau di pantai Sukun itu berbeda karena pengunjung datang duuan, kemudian kami warga Sukun dengan berbondong-bondong berjualan sehingga tidak tertata seperti ini” (wawancara dengan Ibu S).

Bapak J, pemilik rumah makan dan sekaligus nelayan juga mengatakan, “*penataan disini selama ini yang dilakukan warga adalah semau gue*”. Masyarakat Sukun merespon banyaknya pengunjung dengan berdagang dan ketika ada tanah kaplingan yang kosong maka banyak yang didirikan bangunan. Permasalahan pantai Sukun memang memperlihatkan pembangunan dan penataan yang terkesan sporadis dan tanpa rencana. Ke-sporadis-an dan ketanparencanaan semacam ini, justru dalam banyak hal melahirkan “konsep” yang berbeda tentang pembangunan wisata pinggir pantai versi *mainstream* yang terjadi di tempat lainnya. Masyarakat banyak melahirkan berbagai siasat untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami, termasuk masalah sosial maupun alam. Ini bisa berarti strategis dalam hal pemberdayaan masyarakat yang mandiri secara internal tetapi ketika tidak ada pengelolaan bersama secara yang bisa memuaskan semua anggota masyarakat dukuh Sukun maka akan menjadi problematis di tengah ancaman abrasi. Ancaman abrasi ini berarti ruang semakin terbatas dan akan diperebutkan oleh anggota masyarakat yang jumlahnya kian bertambah. Semakin banyak manusia yang mencoba bertarung dan bertahan hidup di tengah kian sesaknya ruang yang tersedia.

1. Transformasi Sosial Dari Periode Ke Periode

Transformasi sosial yang terjadi di masyarakat Sukun terutama mengenai pengelolaan pantai Sukun setidaknya telah terjadi dalam waktu 4 periode. Periode tersebut adalah:

a. Transformasi Sosial Dalam Merespon Alam

Berdasarkan penuturan dari F, selaku Kepala Dukuh Sukun bahwa pada awalnya pemberdayaan pantai Sukun dimulai dari program penghijauan. Bibit tanaman pertama kali diperoleh dari bantuan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pada tahun 1990. Luasnya lahan pesisir pantai Sukun maka diperlukan partisipasi seluruh warga Sukun sehingga untuk mempermudah, mempercepat penanaman dan memberikan tanggungjawab pemeliharaan maka dibuatlah pengkaplingan tanah yang kemudian dibagi ke setiap kepala keluarga di Dukuh Sukun. Terjadi dua kali pembagian kapling yaitu:

Table 1. Pembagian Kapling

	Tahun	Jumlah kapling	Jumlah KK penerima	Lokasi
1.	1991	110 kapling	110 KK	Sebelah utara jalan
2.	1997	120 kapling	120 KK	Sebelah selatan jalan

Jadi bisa dikatakan setiap kepala keluarga mendapat jatah dua kapling yaitu di utara dan di selatan jalan. Di periode pembagian kapling kedua yaitu tahun 1995 diketahui ada tambahan 10 kepala keluarga baru yang berarti hanya mendapat satu kapling di selatan jalan. Prosedur pengkaplingan ternyata lebih mengutamakan orang-orang yang berpengaruh dan punya kuasa di wilayah dukuh untuk bisa memilih lokasi kapling yang dimau. Perlakuan istimewa ini diperuntukkan untuk kepala dukuh, ketua RW, ketua RT, dan pengurus LKMD. Selain yang orang yang punya pengaruh yaitu sebagian besar kepala keluarga dibagi dengan cara *di-lotre* atau diundi. *Sistem* pembagian ini dianggap telah melalui urun rembuk semua masyarakat

dukuh Sukun. Penghijauan oleh masyarakat dukuh Sukun perlahan menunjukkan hasil dan berhasil. Meskipun sebagian tanaman ada yang mati tetapi masyarakat Sukun perlahan belajar tentang penghijauan. Bahkan beberapa warga sudah bisa menjelaskan kenapa suatu pohon bisa mati dengan melihat jenis tanah di akarnya dan hama yang menyerang. Penanaman secara mandiri juga dilakukan oleh masyarakat Sukun.

Pada awalnya penanaman ditujukan sebagai siasat respon terhadap alam yaitu sebagai penghijauan dan sekaligus *wind barrier* (penghalau angin laut yang biasanya bertiup sangat kuat). Selain itu masyarakat dukuh Sukun juga melihat penghijauan ini sebagai cara untuk menghalau uap air laut yang mengandung garam supaya tidak memasuki persawahan ataupun kebun warga sehingga keberhasilan penghijauan di pinggir pantai juga membawa jaminan keberhasilan untuk pertanian masyarakat Sukun. Di saat inilah semua masyarakat dukuh Sukun masih bisa bersama bergotong royong dalam kepentingan yang sama yaitu menjaga laut, sawah dan pemukiman.

b. Transformasi Sosial Merespon Wisata

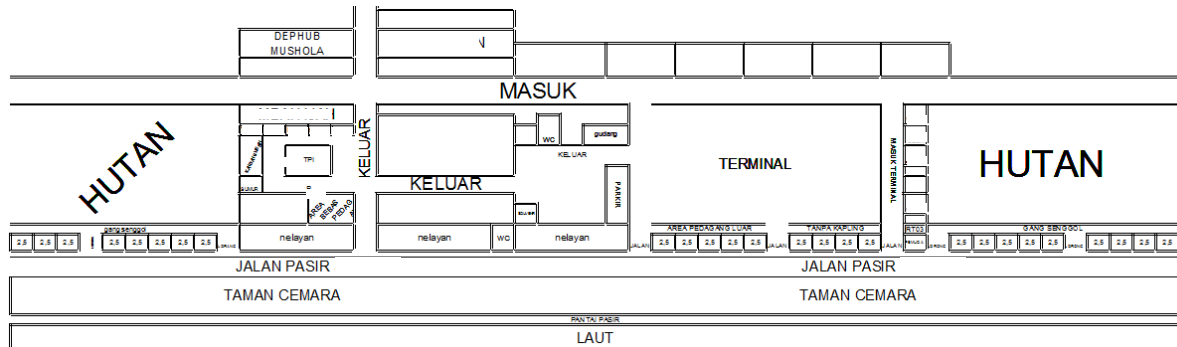
Status keseluruhan tanah di pesisir pantai Sukun adalah Sultan Ground (SG) yang berarti dalam pemahaman Kepala Dukuh dan sebagian masyarakat dukuh Sukun mengamini bahwa mereka hanya mendapatkannya sebagai hak pakai. Terutama di awal pembagian kapling hanya ditujukan untuk kepentingan tanggung jawab penghijauan. Ketika terjadi pembagian lokasi, sebagian masyarakat dukuh Sukun menganggap biasa bahkan ada yang tidak berangkat dalam pengundian. Ada semacam kepercayaan dalam masyarakat Sukun untuk mengelola pantai Sukun karena sudah mendapatkan izin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dikatakan oleh Pak S yaitu salah satu warga Sukun,

Dulu itu tidak kepikiran akan jadi tempat wisata. Sultan nyabdo, “iki garapen. Sesuk nak ono rejane jaman bakale rame kanggo golek pangan”. Sabda sultan itu memperkuat keyakinan kami. Sultan juga membuat mushola disini. Sultan juga menanam pohon Nyamplong tapi malamnya dicuri orang. Sultan juga melepaskan burung ketilang, dekuku dan lainnya. Mungkin artinya biar pantai Sukun lebih hijau, lalu burung-burung rame berkicau.

Seiring bergulirnya waktu dan pantai semakin menghijau teduh, mulailah berdatangan banyak pengunjung. Tahun 2005 dan 2006, para warga Sukun mulai ramai yang mendirikan warung-warung dengan syarat tidak boleh menebangi pepohonan. Berbagai warung semi permanen dan warung krempyeng (penjual makanan dan minuman ringan) bermunculan. Masyarakat dukuh Sukun juga membuat aturan bahwa hanya warga dukuh Sukun saja yang diperbolehkan berjualan di pantai Sukun. Selain itu tidak diperbolehkan berjualan secara langsung tetapi hanya diperkenankan untuk menitipkan barang jualan ke warga Sukun. Jadi penjualan secara langsung tetap di pegang oleh warga Sukun. Aturan eksklusif tersebut menganggap masyarakat di luar Sukun sebagai golongan luar yang mengancam usaha mereka maupun pengelolaan ruang wisata pantai. Ada aturan juga di pantai Sukun tidak diperbolehkan mendirikan bangunan untuk sewa penginapan karena ditakutkan rawan prostitusi.

Jumlah pengunjung setiap tahun semakin meningkat, bangunan permanen banyak yang dibangun oleh warga di pinggir pantai. Bahkan banyak juga yang membuat sumur bor. Keuntungan setiap usaha yang dimiliki warga semakin meningkat begitu pula meningkatkan persaingan diantara usaha terutama di sebelah timur jalan keluar yang paling padat usahanya.

Denah Tata Ruang Pedagang Pinggir Pantai Sukun Tahun 2020



Sumber : D, Sekretaris Pokgiat

Sebelum maraknya pengunjung berwisata dan para pedagang, pemandangan sepanjang mata memandang pantai Sukun hanya ada pepohonan yang rimbun. Perubahan besar terjadi dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2009, dari denah di atas memperlihatkan bangunan permanen. Sampai tahun 2011, sepanjang pantai yaitu di selatan dan utara jalan sudah banyak bangunan permanen yang baru. Bahkan tidak hanya difungsikan sebagai usaha tetapi juga untuk pemukiman. Kondisi sekarang pada denah diatas yang tergambar sebagai ruang hutan sudah berubah menjadi bangunan usaha. Pantai sebelah timur jalan keluar lebih terlihat padat bangunan permanen dan habisnya pepohonan dibandingkan pantai sebelah barat jalan masih terlihat banyak pohon. Keramaian pengunjung dan sirkulasi uang lebih banyak di pantai sebelah timur dikarenakan disana ada terminal yang luas untuk parkir kendaraan sehingga pengunjung lebih memilih tempat yang lebih dekat dengan kendaraan mereka. Apalagi terminal diperluas sampai disebelah utara jalan.

Kelompok nelayan adalah kelompok yang pertama dan sejak dulu ada di pantai Sukun sebelum menjadi tempat wisata. Berkembangnya wisata pantai dan usaha di pantai Sukun membangkitkan kesadaran kelompok untuk membuat wadah kegiatan bersama. Pada awalnya pengelolaan wisata pantai Sukun dikelola oleh Pokgiat (kelompok kegiatan) dan kelompok nelayan dibawah kepemimpinan dukuh Sukun. Lalu bermunculan kelompok-kelompok baru berdasarkan usaha yang dijalankan yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Paguyuban Pinggir Pantai Dahlia Asri dan kelompok pemilik montor sewa ATV. Paguyuban Pinggir Pantai Dahlia Asri yang didirikan tahun 2010 dalam pelaksanaannya juga membawahi dua kelompok yaitu kelompok rumah makan dan kelompok pedagang krempyeng. Peta kekuatan menjadi dua kubu *local power* yaitu kubu kepala dukuh dan kubu nelayan. Kubu kepala dukuh didukung oleh kelompok Pokgiat, Paguyuban Pinggir Pantai Dahlia Asri dan kelompok pemilik montor sewa ATV. Kubu Kepala Duku ini begitu dekat karena ada hubungan kekerabatan yang dekat diantara ketua-ketuanya. Sedangkan kubu kelompok nelayan didukung juga oleh Pokdarwis karena kepemimpinannya satu orang yang sama.

c. Transformasi Sosial Merespon Bencana Abrasi Pantai

Berdasarkan penuturan dari Bapak F selaku Kepala dukuh Sukun yang memimpin dari awal program penghijauan pantai menceritakan bahwa abrasi mulai perlahan di tahun 2006 dan

sampai 2013 telah menghilangkan kurang lebih 9 baris tanaman dengan jumlah sekitar 2000 pohon yang hilang. Pantai juga telah mengilang lebih dari 100 meter. Bahkan H, salah satu pedagang mengatakan kalau abrasi telah menggerus pantai sepanjang 20 meter/tahun. Beberapa warga ketika diwawancarai juga mengatakan bahwa abrasi mulai terlihat setelah adanya gempa di Yogyakarta dan tsunami di Pangandaran.

Tabel 2. Keuntungan Sebelum dan Sesudah Abrasi

No.	Nama	Jenis Usaha	Keuntungan Bersih/ hari Minggu	
			Sebelum Abrasi	Sesudah Abrasi
1.	Sahrowardi (H)	Rumah makan	1.700.000	250.000
2.	Ponijo (P)	Rumah makan	1.200.000	300.000
3.	Sumardi (M)	Kolam renang, jualan baju,	1.500.000	300.000
4.	Jumarno (N)	Toilet dan menjual baju	1.700.000	250.000
5.	Hertanto (T)	Jual baju, toilet, (kolam renang hilang terkena abrasi)	525.000-725.000	175.000-280.000
6.	Sugiyo (G)	Pemilik persewaan	500.000	75.000
7.	Mujiyem (M)	Jual bawang dan lempeyek	175.000-200.000	75.000-100.000
8.	Pujirah (J)	Jual bawang dan lempeyek	180.000	75.000
9.	Sumaryati (R)	Pedagang krempyeng	150.000	50.000

Sumber : Olah data peneliti

Abrasi benar-benar menjadi masalah bagi masyarakat Sukun ketika banyak bangunan usaha milik warga yang hayut terbawa ombak. Selain itu jumlah pengunjung semakin berkurang sehingga pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat juga menurun. Abrasi menjadi ancaman besar bagi masyarakat Sukun. Sebagian pedagang yang kehilangan tanah dan bangunan usahanya terpaksa tidak lagi berjualan dan sebagian lagi harus pindah ke sisi barat jalan yang berarti harus minta ijin kepada pemilik kapling yang ditempati. Masyarakat dukuh Sukun melakukan tindakan dengan penataan bersama oleh Pokgiat sebagai antisipasi terhadap keamanan para pedagang. Semua pedagang sepakat untuk mundur ke sebelah utara. Namun ternyata yang melaksanakan hanya sedikit saja atau tidak kompak sehingga bagi para pedagang yang telah mundur ke sebelah utara merasa dirugikan karena dalam pandangan mereka para

pengunjung lebih tertarik untuk membeli makanan atau minuman di tempat yang lebih dekat dengan pantai.

Selanjutnya para pedagang di pantai Sukun juga melakukan dialog atau musyawarah bersama dengan melibatkan semua kelompok yang ada tetapi setelah melakukan beberapa kali, ternyata tidak mendapatkan kesepakatan untuk melakukan penataan sendiri. Dikatakan oleh salah satu warga bahwa sebenarnya dalam tiga kali pertemuan, semua pedagang sudah setuju untuk dipindah. Namun setelah pertemuan ke empat, pembicaraan semakin alot karena beberapa pedagang tidak mau dipindahkan karena merasa memiliki kaplingan dan akan rugi banyak secara material bangunan dan keuntungan usaha jika harus pindah lokasi. Kalkulasi untung rugi sudah bermain dalam tarik ulur masalah penataan para pedagang. Bagi para pedagang yang memiliki bangunan permanen dan lokasinya dekat dengan pantai maka akan merasa sangat rugi jika harus pindah tempat karena berarti akan memerlukan modal lagi untuk membangun, ada pikiran bahwa lokasi baru tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan di tempat lama dan tidak mau meninggalkan lokasi lama karena dianggap posisi yang strategis serta banyak pembeli.

Proses transformasi sosial masyarakat Sukun memang menginginkan keterpaduan langkah bersama dalam melakukan penataan. Permasalahan yang dialami oleh warga bahwa banyak yang merasa adanya perbedaan dua kubu dengan dua kepentingan dan dua pendapat yang berbeda mengenai penataan.

2. Konflik Ruang dan Persoalan menjadi “Sapi Perah”-nya Pemerintah

Permasalahan dalam dinamika transformasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Sukun tidak hanya sekedar konflik antara kelompok yang berbeda karena penguasaan ruang di pantai untuk keuntungan ekonomi. Namun juga berkaitan dengan bagaimana masing-masing kelompok membangun relasi dalam berebut kuasa pengelolaan wisata pantai Sukun. Bila melihat perjalanan transformasi sosial yang terjadi pada masyarakat Sukun seperti menunjukkan sikap yang labil, yang dulunya bisa bersama dalam satu kepentingan dalam merespon alam, bisa bersama dalam merespon wisata, tetapi selanjutnya tidak bisa sejalan karena ada pertentangan dalam kepentingan kuasa pengelolaan terutama ketika ada wacana penataan pasca relokasi. Di dalam situasi kondisi dimana ada kepentingan bersama dan gotong royong diutamakan, maka transformasi sosial bisa cepat berjalan. Begitu juga ketika di situasi kondisi dimana semuanya ingin bersama dalam mendapatkan keuntungan untuk merespon wisata, maka transformasi sosial begitu terlihat tak ada masalah. Namun ketika dalam situasi kondisi kritis yaitu bencana abrasi yang menyebabkan berkurangnya lahan usaha sedangkan jumlah pedagang semakin banyak maka akan memperlihatkan konflik kepentingan yang begitu terlihat. Bisa dikatakan bahwa ketika ruang menyempit, sedangkan kepentingan yang memperebutkan semakin besar maka yang terjadi adalah konflik perebutan antara individu maupun kelompok. Bahkan bisa juga terjadi pemaksaan atau pembajakan ruang.

Proses awal transformasi yaitu program penghijauan dan kemudian merespon wisata pantai tidak serta merta tanpa permasalahan tetapi masalah besar itu sebenarnya muncul dari awal. Masalah itu memang tersembunyi, ibaratnya ada api kecil di dalam sekam yang ketika dibiarkan dan mendapat tiupan angin maka api itu akan semakin membesar. Pengkaplingan tanah bagi sebagian masyarakat dianggap tidak adil. Meskipun dalam kenyataannya pada saat pertama kali penghijauan, banyak warga Sukun yang tidak berpikiran di suatu saat akan menjadi tempat wisata sehingga ada beberapa kapling tanah yang tidak mau dikelola oleh

warga karena akses tempatnya jauh dari jalan sehingga dikelola oleh kepala dukuh. Ada asumsi bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh para pengurus dukuh, RW, RT, dan LKMD untuk dapat memilih tempat kaplingan merupakan bukti bahwa di awal pengkaplingan sudah ada kuasa ruang yang strategis untuk kepentingan untung rugi. Seperti yang diungkapkan oleh Sd:

Penataan yang penting adil dan merata. Tidak boleh ada pembedaan. Karena selama ini ada pembedaan. Seperti tanah yang saya tempati ini, bukan milik saya. Kapling tanah yang besar hanya didapatkan orang yang kuat kuasa. Orang yang kuasa akan punya lahan yang besar seperti ini. Pembagian tidak pernah merata. Pak dukuh punya banyak kapling. Katanya tanah disini tidak boleh dijual ke orang lain tetany kenyataannya tanah sebelah utara itu ada yang dijual oleh pak dukuh. Bayak warga yang tidak dapat. Warga yang jualan krempyeng tidak dapat tanah yang besar seperti ini. Berbeda dengan pantai Baru, disana adil merata dan dihargai. Pak dukuh, RW, RT semuanya dapat lahan yang besar.

Perbedaan pendapat antara hak pakai dan hak milik pada tanah di pantai Sukun muncul menjadi dilema dalam urusan pengelolaaannya. Pemerintah dan sebagian warga termasuk pengurus dukuh Sukun menyakini bahwa tanah yang mereka kapling adalah sekedar hak pakai saja karena tanah tersebut adalah termasuk Sultan Ground (SG). Sahrowardi bercerita bahwa Sultan Hamengkubuwono X pernah mengunjungi pantai Sukun saat meresmikan Mushola tanggal 31 januari 2000 dan mengatakan, “*ojo mbangun omah digedung, nggaweo kotangan* (jangan membangun rumah permanen, buatlah yang semi permanen)”. Sultan juga berpesan kalau suatu saat nanti ingin minta ganti rugi jika diminta pindah disarankan untuk membuat surat Magersari yang berasal dari Keraton. Permasalahannya, warga Sukun merasa kesulitan dalam mengurus Magersari karena prosedurnya terlalu berbelit dan banyak biayanya. Penggunaan kata “penataan” sering digunakan oleh para ketua kelompok di Sukun ketika bercerita tentang upaya transformasi yang akan dilakukan. Namun berdasarkan dari penjelasan tahapan proses yang akan dilakukan ternyata yang terjadi adalah pemindahan lokasi berdagang atau relokasi. Penggunaan kata “penataan” memang terkesan sebagai bahasa politis yang digunakan oleh pemerintah kemudian disosialisasikan ke publik untuk menghindari efek penolakan dan pertentangan secara langsung. Penataan juga berarti memberikan ruang kuasa lebih untuk pemerintah hadir dalam pengelolaan wisata pantai Sukun.

Masyarakat Sukun sebenarnya mempunyai nilai-nilai dan kemandirian sendiri dalam pengelolaan pantai Sukun tetapi berbanding terbalik dengan pandangan pemerintah bahwa masyarakat harus menggali dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Pesona Wisata yang sebenarnya bentuk pengaturan kepada masyarakat. Pandangan pemerintah mengenai pengaturan wisata terlihat di dalam baliho yang berada di dekat pintu masuk mengarah pantai yaitu:

Sadar wisata adalah suatu keadaan yang diinginkan (ideal) terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan unsur-unsur sapta pesona. Untuk dapat menciptakan keadaan yang diinginkan tersebut, anggota masyarakat perlu diajak dan dibantu sehingga dapat memahami bagaimana pentingnya arti dan manfaat dari suatu kegiatan pariwisata.

Selain itu terungkap beberapa kali Kepala Dukuh dan ketua Kelompok Kegiatan (Pokgiat) mengatakan ingin melaksanakan Sapta Pesona Wisata yang digagas, disosialisasikan dan diinginkan oleh pemerintah kepada semua tempat wisata termasuk dalam wacana penataan pantai Sukun. Isi Sapta pesona itu adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan

kenangan. Berdasaekan berita diatas, Sapta Pesona Wisata mencerminkan ada anggapan bahwa hanya pemerintah-lah yang memiliki kesadaran dan harus mengarahkan masyarakat. Slogan Sapta pesona Wisata juga menjadi bahasa pengetahuan dari luar masyarakat yang dipaksakan untuk dijalankan. Masyarakat dijadikan obyek dalam rangka pemberdayaan wisata. Pemaksaan bahasa pengetahuan atau slogan pembangunan bisa jadikan sebagai sarana untuk memperkuat kuasa negara melalui pola yang seragam untuk mengendalikan dan menguasai. Sekaligus menempatkan posisi pemerintah sebagai subyek. Kasus diatas memperlihatkan bahwa ada pola komunikasi yang timpang dan relasi kuasa yang tidak setara bahwa penggunaan bahasa dan slogan pembangunan menjadikan posisi bahasa pemerintah lebih mendominasi daripada bahasa masyarakat lokal. Akhirnya masyarakat juga terpengaruh dalam menyampaikan suara dan ide pemberdayaan harus menggunakan bahasa pemerintah.

Banyak warga yang sudah terlanjur membuat bangunan permanen untuk usaha maupun beberapa ada yang digunakan sekaligus tempat tinggal. Tanggapan terhadap relokasi ternyata beragam, yaitu :

- Menolak relokasi dengan alasan kerugian secara material dan finansial kalau dipindah karena sudah memiliki bangunan dan usaha diatas tanah terutama tempat yang dimiliki strategis. Sebagian warga terutama nelayan yang diketuai oleh Ponijo menolak untuk relokasi karena mereka sudah hidup lama di pinggir pantai dan tidak punya tempat tinggal lagi. Pantai dan laut bagi nelayan adalah kehidupan milik mereka.

Alasan yang lain penolakan relokasi adalah tempat rencana relokasi merupakan tanah pengkaplingan periode pertama yang dilakukan tahun 1991 yang berarti sudah dimiliki oleh warga Sukun lainnya. Relokasi akan memunculkan gesekan sosial antara para pedagang dengan pemilik kaplingan yang dijadikan tempat relokasi.

- Menerima relokasi, dengan alasan untuk keamanan dan keselamatan para pedagang serta pengunjung pantai. Ada harapan relokasi bisa sekaligus menjadi moment untuk membenahan dalam pengelolaan pantai Sukun terutama lokasi berdagang agar lebih rapi dan bersih sehingga bisa menarik para pengunjung wisata. Sebagian besar warga Sukun menerima relokasi terutama para pengurus dukuh, pokgiat, kelompok pedagang krempyeng, kelompok rumah makan, para pedagang yang tidak memiliki kaplingan maupun yang kaplingnya telah terkena abrasi.

Bisa diartikan bahwa relokasi berarti perombakan ulang mengenai tanah di pantai Sukun. Tanah hasil pembagian kapling tahun 1997 berarti harus dikosongkan karena masih termasuk dalam area 200 meter dari pantai. Tanah pembagian kapling tahun 1991 yang nantinya digunakan untuk relokasi akan ditata ulang dan kemudian di bangun area berdagang.

Tersendatnya proses dalam pengambilan keputusan secara internal mengenai penataan secara internal diantara kelompok-kelompok di Sukun, terkesan menjadikan ruang kuasa bersama menjadi kosong tanpa kendali bahkan terlihat ada keputus-asaan sebagian masyarakat Sukun sehingga seakan mengharapkan turun tangannya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami. Di sisi lain selama ini ada pandangan bahwa pemerintah tidak pernah hadir (absent) dalam pemberdayaan masyarakat Sukun dan pengelolaan wisata

pantai. Kehadiran pemerintah dianggap terlambat dan bersikap melakukan pembiaran kepada masyarakat untuk menerima dan merelakan bencana sebagai penderitaan yang dialami sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang, Pak H:

Menurut saya dari dulu Sukun dibiarkan saja oleh pemerintah. Mengapa kami dibiarkan?. Padahal retribusi dari Sukun yang masuk ke pemerintah itu jumlahnya terbesar setelah pantai Parangtritis. Mungkin pemerintah mengecap warga Sukun itu suka ngeyel semua karena sejak dulu tidak mau diatur oleh pemerintah. Saya yakin ini cuma miskomunikasi.

Ada juga warga yang berpendapat bahwa mereka seperti dijadikan “sapi perah” karena retribusi yang besar kepada pemerintah tetapi tidak diimbangi dengan timbal balik perhatian pemberdayaan dan upaya mengatasi masalah abrasi. Dalam kasus ini masyarakat Sukun sudah tahu sebab adanya abrasi pantai Sukun juga dikarenakan adanya penghalangan dan pengerukan pasir pasca erupsi gunung merapi sehingga tidak mengalir melalui kali-kali. Padahal dulu ketika ada abrasi tidak ada masalah karena ada tambahan pasir di pantai melalui kali yang berasal dari gunung merapi. Pemerintah dianggap ikut bertanggung jawab terjadinya abrasi karena membiarkan terjadinya pengerukan pasir di gunung Merapi.

Pengetahuan lokal masyarakat Sukun terutama kelompok nelayan menganggap bahwa abrasi adalah gejala alam yang biasa mereka alami setiap tahun dari dulu. Masyarakat sudah banyak yang tahu tipikal laut yang berhadapan dengan pantai Sukun mempunyai dua palung besar. Masyarakat Sukun menamai dua palung besar dengan nama *Bladon Kebo* yang berada di sebelah timur dan *Bladon Singkil* yang berada di sebelah barat. Ada juga warga nelayan yang mengatakan bahwa dua *bladon* sudah menyatu menjadi satu. Ombak besar sudah ada dari dulu dan bagi masyarakat Sukun sudah tahu waktu terjadinya ombak besar yaitu biasanya saat bulan purnama dan pada saat *mongso loro* dan *mongso telu*. Ombak akan kembali normal pada saat *mongso sekawan* dan *mongso gangsal*. Tipe pantai Sukun juga diketahui mereka pada musim kemarau, angin akan memindahkan pasir dari sisi timur ke sisi barat dan akan terjadi sebaliknya di musim penghujan. Dulu keberadaan stok pantai selalu tetap bahkan bertambah dari pasir yang mengalir dari gunung Merapi melalui sungai. Ombak dan angin besar dulunya adalah siklus alam yang normal dan tidak mengancam maupun menjadikan abrasi. Namun setelah pemerintah membangun dam-dam penghalang lahar di gunung Merapi dan adanya pengerukan besar-besaran pasir maka pantai Sukun semakin tergerus oleh ombak tetapi tidak ada tambahan pasir dari aliran sungai yang berasal dari gunung Merapi.

3. Polarisasi Kekuasaan antara Kelompok

Munculnya kelompok-kelompok internal di dalam masyarakat dukuh Sukun yang terfragmentasi untuk berebut akses kuasa pengelolaan sudah terlihat di awal pengelolaan pantai terutama dalam pembagian kapling tanah. Setelah itu adanya peraturan mengenai pembagian kekuasaan parkir antara kelompok nelayan (termasuk kelompok sadar wisata) dengan Kelompok Kegiatan (yang didalamnya termasuk pengurus dukuh, kelompok pedagang krempyeng dan kelompok rumah makan). Posisi parkir bagi para pedagang sangat menentukan tingkat keuntungan usaha mereka dalam artian usaha dagang yang berdekatan dengan parkir akan mendapatkan untung yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang jauh dari parkir.

Akses parkir lebih dikuasai oleh kelompok nelayan dan pokdarwis. Pengelolaan parkir tidak dilakukan dalam pengelolaan bersama tetapi dengan pembagian hari diantara kelompok.

Sahrowardi, ketua kelompok pedagang krempyeng mengatakan bahwa Pokgiat mengambil alih parkir dan hasil keuntungannya hanya ketika hari minggu dan liburan. Sedangkan Kelompok nelayan dan Pokdarwis memegang parkir dan hasil keuntungannya pada hari biasa yaitu hari senin - sabtu. Kalau dalam satu tahun ada 365 hari, maka mereka 60 hari untuk pokgiat dan sisa harinya yang lebih besar yaitu 300 hari diberikan pada kelompok nelayan dan pokdarwis. Bagi beberapa warga menganggap pembagian parkir ini tidak adil. Apalagi penempatan dua terminal parkir besar berada di sebelah timur jalan yang berarti lebih menguntungkan kelompok nelayan dan pokdarwis.

Table 3. Polarisasi Dan Pertentangan

Polarisasi dan pertentangan antara kelompok dalam pengelolaan pantai Sukun		
<ul style="list-style-type: none"> -Kelompok Nelayan -Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) <p>Keterangan: ketua kelompok nelayan dan Pokdarwis adalah satu orang yaitu Ponijo dan lebih banyak didukung oleh para nelayan. Lokasi tempat kapling lebih banyak di sebelah timur jalan.</p>	VS	<ul style="list-style-type: none"> -Pengurus Dukuh -Kelompok Kegiatan -Kelompok Rumah makan -Kelompok pedagang Krempyeng <p>Keterangan: ketua-ketuanya termasuk masih ada hubungan saudara dengan Kepala Dukuh. Lokasi tempat kapling lebih banyak berada di barat jalan.</p>

Sumber :Olah data Peneliti

Konflik lebih terlihat antara kubu barat jalan (pengurus Dukuh, Pokgiat, kelompok rumah makan dan kelompok pedagang krempyeng) dengan kubu timur jalan (kelompok nelayan dan pokdarwis). Berdasarkan wawancara ternyata kubu barat jalan lebih mudah menata diri, mau direlokasi dengan ganti rugi dan terkesan patuh dengan keputusan pemerintah mengenai pengelolaan pantai. Sedangkan kubu timur banyak yang tidak setuju dengan relokasi, menolak ganti rugi dan campur tangan dari pemerintah mengenai penataan. Kubu timur jalan lebih menginginkan masyarakat Sukun sendirilah yang mengelola pantai Sukun.

Permasalahannya juga adalah selama ini ada bantuan dari pemerintah atau lembaga lain selalu melalui kelompok-kelompok itu. Banyak bantuan yang masuk hanya ke kelompok nelayan dan ada yang mengatakan kelompok lain tidak tahu transparansi dana maupun pengelolaan bantuan itu. Begitu juga bantuan yang diterima kelompok-kelompok lain hanya bisa diakses oleh para pedagang yang mempunyai kedekatan dengan ketua masing-masing kelompok. Banyak pedagang yang tidak mengetahui informasi mengenai bantuan pemberdayaan dan bahkan merasa termarginalkan, termasuk juga tidak mendapatkan kapling tanah. Permasalahan pengelolaan pantai oleh masyarakat Sukun semakin rumit seperti yang dikatakan oleh Sahrowardi:

Adanya gerak yang tidak sejalan antara Pokgiat dengan Pokdarwis atau kelompok nelayan. Buntutnya kesepahaman mengenai penataan para pedagang di pantai Sukun terutama pemindahan kapal yang ditolak oleh Pak P. Ketidak terpaduan antara satu kelompok dengan yang lainnya mengakibatkan penataan terbengkalai dan para ketua *mengobyek*. Seringkali bantuan itu masuknya hanya ke satu orang yaitu ketuanya.

Kelompok nelayan menjadi kelompok yang secara jumlah sebenarnya lebih kecil dibandingkan kelompok lain tetapi secara suara dan kuasa pengelolaan pantai lebih besar terutama adanya ketokohan dari ketuanya yaitu P. P menempatkan dirinya sebagai *awune* wilayah pantai Sukun atau orang yang harus dituakan dan dihormati jadi apapun program yang dilakukan di pantai Sukun harus diketahui dan disetujui oleh P. Secara garis keturunan, Ponijo adalah keturunan dari Mbah K atau yang sering disebut sebagai Mbah Ireng yang merupakan nelayan dan orang yang pertama tinggal di pantai Sukun. Ponijo sejak umur 5 tahun sudah diajak untuk melaut, oleh karena itu pengetahuan tentang apa yang terjadi di pantai Sukun sangat mendalam.

Ponijo dengan kelompok nelayan dan Pokdarwis yang dipimpinnya selalu mempunyai *bargaining position* mengenai kepemilikan tanah di pantai Sukun, bahkan kalau meskipun di suruh pindah maka pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak. Mereka juga bersikeras tidak mau disetr oleh pihak lain bahkan pemerintah dan pengelolaan harus tetap dikelola dengan menggunakan nilai-nilai masyarakat Sukun. Tetapi banyak warga yang lain menganggap Ponijo otoriter dan ingin punya kuasa lebih terhadap ruang, kuasa dan keuntungan yang lebih dari pantai Sukun sehingga melupakan warga selain nelayan yang tidak memiliki tanah bahkan ruang untuk berdagang.

4. Menuju Solusi Bersama

Transformasi sosial selalu bergerak dalam dinamika masyarakat di dalamnya. Tidak ada transformasi sosial yang bergerak dalam keseragaman atau monovokal. Selalu ada suara-suara yang berbeda dan tarik ulur kepentingan maupun pertarungan kuasa. Hal yang terpenting dalam transformasi adalah pemberdayaan masyarakat seluruhnya tanpa ada yang dirugikan sehingga semua kelompok harusnya bersinergi untuk kepentingan bersama. Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan pantai Sukun oleh masyarakat adalah berhentinya ruang dialog bersama karena tidak mendapatkan langkah solusi bersama. Puncak dari suatu “*deadlock*” dalam suatu dialog, dan biasanya tidak terhindari suatu kekerasan (Kayam, 1993:179). Kekerasan itulah yang tidak diinginkan. Bahkan muncul konflik yang memunculkan keapatisan dengan mengungkapkan, “kalau warga yang tidak mau ditata maka akan dipindah sendiri oleh ombak dan abrasi”.

Ada kesukaran dalam dialog mengenai transformasi sosial ketika ada pertentangan antara dua kekuatan yaitu struktur kekuatan resmi yaitu pemerintah dan struktur kekuatan tidak resmi di dalam masyarakat yang memungkinkan memiliki pengaruh yang lebih besar. Struktur kekuatan tidak resmi ini biasanya lebih dikehendaki dan disetujui oleh anggota masyarakat. Problematik akan bertambah ruwet ketika di dalam kekuatan tidak resmi ada saling pertentangan secara internal diantara kelompok dan saling berebut kuasa untuk mendapatkan pengakuan (*legitimacy*) oleh para warga dan pemerintah sebagai pelaksana. Dalam kondisi seperti ini, proses transformasi sosial sangat bergantung pada personal-personal pimpinan dalam masing-masing kelompok. Dialog yang hanya dilakukan para pemimpin atau elit lokal dan hasilnya bersifat intruksi dianggap menjadi suara kuasa yang dominan dan akan menekan

otonomi individual. Tidak adanya titik temu dalam koordinasi dan semakin rumitnya problematika yang menekan serta memperlemah struktur kekuasaan tidak resmi (kelompok-kelompok internal dalam masyarakat) menjadikan sebagian masyarakat berharap pada struktur kekuatan resmi yaitu pemerintah yang dianggap bisa sebagai fasilitator.

Pembicaraan tentang relokasi dan penataan saat ini menuju kompromi diantara kelompok masyarakat dukuh Sukun dan pemerintah. Masyarakat Sukun mulai menentukan sikap jikalau ada penataan dari pemerintah maka desain penataan harus diusulkan dan disetujui oleh semua kelompok dan pengelolaan pantai Sukun tetap dipegang oleh masyarakat dukuh Sukun. Penataan dan relokasi menjadi langkah untuk menata kembali transformasi sosial yang baru pasca abrasi. Beberapa kali maket penataan yang dibuat oleh pemerintah dibahas bersama dalam kelompok masyarakat Sukun dengan mengkritisnya dan melakukan pembenahan dalam maket. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga bahwa penataan harus bisa menampung seluruh jenis usaha warga termasuk menjual hasil pertanian. Penataan juga diharapkan oleh warga dengan menggunakan kearifan lokal.

Kesimpulan

Keberadaan masyarakat dukuh Sukun sebagai pedagang sekaligus sebagai pelaku dan pengelola utama di pantai Sukun tidak bisa diartikan hanya sebagai pertukaran ekonomi tetapi juga memainkan peran sosial, budaya bahkan politik sebagai bentuk relasi dan dinamika yang dibangun dalam proses transformasi sosial. Proses transformasi masyarakat dukuh Sukun dari periode yang berbeda akan terlihat bagaimana yang awalnya ada kesadaran untuk merespon alam yaitu penghijauan pantai dan peningkatan pertanian. Lalu periode berikutnya ada kesadaran untuk merespon wisata pantai yang didalamnya ada proses monetisasi dan munculnya aktor-aktor kekuasaan lokal. Dulu ketika peredaran uang tidak begitu besar dan pertukaran jasa melalui manifestasi gotongroyong dalam penghijauan pantai Sukun bisa dalam satu kebersamaan dan dinamika masyarakat lebih stabil. Ketika marak wisata pantai dan seiring proses monetisasi maka struktur masyarakat dikaitkan secara kepemilikan obyek yaitu material. Kepemilikan obyek material berupa uang ataupun kekayaan bisa cepat berubah keadaanya sehingga pengaruh dan kekuasaan menjadi labil (soedjito, 1986: 5).

Monetisasi akan membawa serta diferensiasi dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Dengan masuknya ekonomi uang dan kurangnya ketergantungan antara seorang dengan orang lain maka terjadi pula proses individualisasi dengan logika rasional efisiensi dan prinsip sibernatika berjalan (Soedjito, 1986: 62-63). Pada periode selanjutnya ketika ada abrasi besar yang mengancam usaha warga dukuh Sukun di pantai muncul kembali kesadaran merespon alam tetapi sekaligus mengangkat permasalahan perebutan akses sumber daya yang menjadi pertentangan antara kelompok yang berbeda. Masyarakat dukuh Sukun mengalami perubahan struktur ke arah adanya “*stand*”(pengelompokan dalam golongan-golongan berdasarkan pekerjaan) karena meningkatnya peredaran uang. Perbedaan pekerjaan di dukuh Sukun menjadikan munculnya berbagai kelompok dengan kepemimpinan yang berbeda juga dengan alasan untuk menampung kepentingan-kepentingan yang berbeda juga.

Dinamika dalam proses transformasi sosial di dukuh Sukun terlihat adanya kesadaran posisi dan status sosial para pemimpin atau *local power* yang memainkan peranannya untuk menciptakan *role play* atau aturan main dalam pengelolaan pantai Sukun. Kesadaran ini terlihat di awal pembagian kapling tanah dan kemudian tersembunyi ketika semuanya bergerak dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi terutama saat ramainya pantai Sukun sebagai tempat wisata favorit. Setelah adanya abrasi besar dan adanya kekhawatiran mengenai keberadaan fisik material atau ruang yang semakin terancam maka kesadaran posisi dan status sosial ini memainkan aturan main lagi dengan adu kekuatan di antara kelompok yang sudah terpolarisasi untuk mendapatkan kuasa ruang. Orientasi ekonomi menjadi penggerak untuk kuasa kepemilikan ruang usaha yang lebih luas. Kuasa ruang ditambah dengan eksploitasi yang tidak memperhatikan keterbatasan-keterbatasan alam bukan lagi membawa peningkatan ekonomi, tetapi berbalik mendatangkan bencana dan konflik internal antara kelompok dalam masyarakat.

Munculnya wacana penataan dari pemerintah seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah menjadi solusi penyelamat ketika dialog internal masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali tidak mencapai kesepakatan. Tapi di sisi lain, wacana tersebut malah menjadi pemantik konflik kepentingan diantara kelompok yang berbeda di dalam internal masyarakat dukuh Sukun. Seperti yang dituliskan oleh Soedjito (1986: 26), “ada kalanya suatu tindakan sosial yang maksudnya menolong dapat menimbulkan persoalan-persoalan”. Pantai Sukun menjadi ruang yang mulai terbuka, buktinya beberapa pedagang dari luar dukuh Sukun yang masuk berjualan di area pantai. Lama kelamaan bisa terjadi banyak pedagang baru yang memenuhi sudut-sudut area wisata pantai maupun menempel pada usaha yang sudah ada sehingga membuat berkurangnya ruang publik untuk penghijauan dan pengunjung jika tidak ada penataan. Berkurangnya ruang pantai dan sekaligus ruang usaha, sedangkan jumlah pedagang semakin banyak menyebabkan kemerosotan kehidupan sosial ekonomi. Mungkin bisa saja terjadi seperti apa yang pernah dituliskan oleh Clifford Geertz dengan istilah *shared poverty*, yaitu proses terjadinya pembagian kemiskinan dan kemelaratan antara para pedagang karena menyempitnya ruang usaha mereka. Pengangguran-pengangguran tersembunyi akan mengancam para pedagang ketika tidak adanya transformasi dalam penataan ruang. Apalagi dikaitkan dengan ruang sebagai tujuan wisata yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian untuk memperoleh tempat yang nyaman dan aman bagi para pedagang dan pengunjung.

“*Ombak nguruk’i griya, laute mpun ngaler* (ombak menenggelamkan rumah, dan lautnya sudah semakin ke utara (daratan)”, kata Ibu Pujirah yang sudah berjualan *brambang* (bawang merah) dan *peyek rebung* (kerupuk udang) di pinggir pantai Sukun selama 3 tahun. Ibu Pujirah merupakan pedagang yang berpindah dari pantai Samas. Sebagai warga Samas, Ibu Pujirah dulu mempunyai warung makan yang katanya lumayan besar di pinggir pantai Samas. Penghasilannya dulu di pantai Samas ketika masih ramai pengunjung juga dianggap bisa mensejahterakan keluarganya. Namun abrasi sudah menggerus dan menghilangkan sebagian besar pantai Samas. Abrasi di pantai Samas sudah lama terjadi dibandingkan abrasi yang terjadi di pantai Sukun dan dampaknya pun lebih parah di pantai Samas. “*warung neng samas wes dadi segoro, nggeh mboten mande* (warung saya yang di pantai Samas sudah menjadi laut, tidak bisa berjualan lagi)”, ungkap Ibu Pujirah menjelaskan alasan pindah ke pantai Sukun. Membaca alam adalah sangat penting untuk masyarakat yang berbasis pertanian dan nelayan.

Refleksi untuk merespon bencana alam dan mengelola transformasi sosial juga perlu untuk melihat cerita yang dialami oleh pantai lain yang juga pernah mengalami abrasi. Berkaca



dari pantai sebelah Sukun yaitu pantai Samas, mau dibawa kemanakah arah transformasi sosial pantai Sukun?. Ruang yang dulunya menjadi ruang bersama kemudian tersekat-sekat memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri. Ketika tidak ada ruang dialog bersama maka yang terjadi adalah konflik yang didasarkan pada monetisasi dan transaksional ruang (maksimalisasi keuntungan dalam perebutan ruang). Ketika bencana dibiarkan semakin besar maka semuanya yang akan menjadi korban.

Perbincangan dengan para pedagang mengisyaratkan adanya kerinduan dan keinginan dari masyarakat Sukun untuk mewujudkan terciptanya suasana yang adil, kemandirian, kesetiakawanan dan tidak hanya para pemimpin masyarakat yang mendominasi suara tetapi semua warga memiliki hak suara dalam proses transformasi sosial. Sistem komunikasi yang terbuka memberi kesempatan masyarakat sekaligus para pedagang untuk memperoleh informasi secara leluasa. Di masa lalu, pemimpin atau elit lokal menjadi patron atau bos. Namun, sekarang ada ide untuk menjadikan pemimpin sebagai partner bagi mereka yang dipimpin. Inisiatif dan kreativitas sosial budaya ingin selalu dipegang oleh masyarakat Sukun sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi sosial.

Referensi

- Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Amin, M. Masyur dan Mohammad Najib (Editor). 1993. *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hart, Gillian; Andrew Turton and Benjamin White. 1989. *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. London: University of California Press
- Hoed, Benny H. 2001. *Dari Logika Tuyul ke Erotisme*. Magelang: IndonesiaTera.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.
- Sosrodirdjo, Soedjito. 1986. *Transformasi Sosial: Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.